

## Kekuasaan dan Seksualitas: Homofobia sebagai Konstruksi Sosial dalam Perspektif Foucault

Ratri Ayu Bethari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

E-mail: ratriayu01@mail.ugm.ac.id<sup>1</sup>



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 21-02-2024

Direview: 26-02-2024

Publikasi: 30-09-2024

### Abstrak

Homofobia seringkali dianggap sebagai respon normal terhadap homoseksualitas yang menyimpang dari norma sosial dan agama. Istilah ini pertama kali digunakan oleh psikolog George Weinberg dalam bukunya *Society and the Healthy Homosexual* (1972) untuk mendeskripsikan prasangka, ketakutan, dan penolakan terhadap individu homoseksual. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa pandangan terhadap homoseksualitas tidak bersifat alami, tetapi dipengaruhi oleh norma dan nilai yang dibangun melalui teori wacana Michel Foucault. Fokus penelitian ini adalah bagaimana homofobia dalam perspektif Foucault, muncul sebagai wacana yang diciptakan oleh kekuasaan untuk mengontrol masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan hermeneutika untuk menganalisis teks-teks terkait pemikiran Foucault dan homofobia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan menurut Foucault tersebar di mana-mana dan bukanlah institusi terpusat. Wacana yang merupakan hasil dari penyebaran pengetahuan oleh kekuasaan berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap homoseksualitas. Wacana ini menciptakan kategori seksualitas yang normal dan abnormal dengan homoseksualitas dianggap sebagai deviant. Penelitian ini menyimpulkan bahwa homofobia adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh wacana kekuasaan untuk mempertahankan kontrol atas masyarakat dan bahwa pandangan negatif terhadap homoseksualitas didasarkan pada norma dan nilai yang dihasilkan oleh kekuasaan melalui wacana.

**Kata Kunci:** homofobia; homoseksualitas; foucault; seksualitas; konstruksi sosial

### Abstract

Homophobia is often regarded as a normal response to homosexuality, which deviates from social and religious norms. The term was first coined by psychologist George Weinberg in his book *Society and the Healthy Homosexual* (1972) to describe prejudice, fear, and rejection towards homosexual individuals. This research aims to understand that views on homosexuality are not natural but influenced by norms and values constructed through Michel Foucault's theory of discourse. The focus of this study is how homophobia, from Foucault's perspective, emerges as a discourse created by power to control society. The research method employed is a literature study with a hermeneutic approach to analyze texts related to Foucault's thoughts and homophobia. The findings indicate that power, according to Foucault, is pervasive and not centralized. Discourse, as a result of the dissemination of knowledge by power, plays a role in shaping society's perception of homosexuality. This discourse creates categories of normal and abnormal sexuality, with homosexuality being considered deviant. The study concludes that homophobia is a social construct formed by the discourse of power to maintain control over society, and that negative views towards homosexuality are based on norms and values produced by power through discourse.

**Keywords:** homophobia; homosexuality; foucault; sexuality; social construct

## 1. Pendahuluan

Homofobia seringkali diterima begitu saja sebagai respon normal terhadap homoseksualitas yang menyimpang dari norma-norma sosial dan agama yang diakui. Awalnya, 'homofobia' digunakan untuk mendefinisikan ketakutan pria heteroseksual akan pandangan orang lain yang mengira dirinya adalah homoseksual (Herek, 2004). Namun, pada 1972, psikolog George Weinberg dalam bukunya yang bertajuk *Society and the Healthy Homosexual*, menggunakan istilah homofobia dalam ranah yang lebih sesuai dengan apa yang kita pahami saat ini, yakni suatu prasangka, ketakutan, maupun penolakan terhadap individu atau kelompok homoseksual. Ketakutan akan homoseksualitas muncul dalam berbagai bentuk termasuk diskriminasi, penolakan, pelecehan verbal atau fisik, dan sikap negatif lainnya.

Sejak beberapa abad terakhir, homoseksualitas dianggap sebagai problem sosial yang harus dikaji secara mendalam dan terpisah. Namun, dengan penggunaan term homofobia secara luas sejak buku Weinberg dipublikasikan, memberikan validasi terhadap adanya penolakan dan prasangka terhadap kelompok homoseksual. Istilah homofobia menjadi titik perubahan asumsi sentral masyarakat heteroseksual dengan membebaskan 'masalah' bukan pada individu homoseksual, melainkan pada heteroseksual yang tidak toleran terhadap homoseksualitas (Herek, 2004). Perubahan paradigma tersebut terjadi sejalan dengan keraguan atas berbagai aturan dan norma sosial tentang gender. Homofobia mencerminkan semangat zaman dari *New Gay Liberation Movement*, yakni bahwa batas antara heteroseksualitas dan homoseksualitas bersifat arbitrer dan buatan. Gerakan tersebut, pembebasan gay (*gay liberation*) dan feminis lesbi (*lesbian feminism*) menyetujui bahwa batasan antara heteroseksualitas dan homoseksualitas adalah konstruksi budaya dan berupaya untuk meruntuhkannya (Foucault, 1978).

Gagasan Michel Foucault dalam *The History of Sexuality* (1976), telah menciptakan gelombang perubahan paradigma dalam kajian seksualitas dan gender. Karya tersebut berupaya menguraikan jalinan rumit antara kekuasaan dan wacana yang membentuk seksualitas. Wacana seksualitas diulas secara historis sebagai efek dari kekuasaan di setiap masa. Sebagai filsuf post-strukturalis, Foucault berupaya untuk mengkritisi konsep kekuasaan yang hanya dimiliki kelompok tertentu dan adanya dominasi atas suatu kelompok di dalamnya. Menurut Foucault, kekuasaan berada di mana saja dan bukanlah sebuah institusi atau struktur terpusat sebagaimana filsuf strukturalis mendefinisikan kekuasaan (Foucault, 1978). Analisis kekuasaan oleh Foucault juga mengimplikasikan pandangan bahwa kekuasaan tidak lagi berbentuk oposisi biner karena kekuasaan datang dari bawah dan mencakup keduanya. Dengan demikian, maka yang menjadi fokus perhatiannya adalah bagaimana kekuasaan dijalankan sebagai mekanisme dan strategi serta praktik kekuasaan dalam masyarakat, alih-alih dalam struktur sosial-politik negara.

Wacana seksualitas terus-menerus diproduksi pada tubuh sebagai tempat kekuasaan dijalankan dan diperdebatkan. Gagasan Foucault membuka pintu untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kekuasaan dan wacana saling terkait dalam membentuk persepsi masyarakat atas orientasi seksual yang berbeda, utamanya homoseksualitas dan wacana homofobia. Wacana (*discourse*) merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan yang mengatur apa yang bisa dikatakan, siapa yang boleh mengatakan, bagaimana cara mengatakan, hingga kapan suatu hal bisa dikatakan (Siregar, 2021). Menurut Foucault, wacana merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan relasi kuasa. Dengan demikian, wacana tidak pernah netral: wacana mengatur, membatasi, dan memproduksi objek-objek pengetahuan yang dihasilkan oleh kekuasaan. Dengan demikian, melalui wacana, norma-norma sosial, pandangan bersama dalam masyarakat, dan apa yang dianggap normal dan yang tidak, bisa terbentuk.

Berpijak dari latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk memahami bahwa pandangan terhadap homoseksualitas tidak bersifat alami atau inheren, tetapi dipengaruhi oleh norma dan nilai yang dibangun melalui teori wacana Michel Foucault. Fokusnya adalah bagaimana homofobia, dalam perspektif Foucault, muncul sebagai wacana yang diciptakan oleh kekuasaan untuk mengontrol masyarakat. Homofobia yang dianggap sebagai respon normal, dicurigai sebagai konstruksi sosial yang berakar pada teori wacana dan seksualitas Foucault yang memisahkan antara seksualitas normal (heteroseksual) dan *deviant* (homoseksual). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoritis tentang hubungan antara kekuasaan, wacana, dan konstruksi sosial homofobia.

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bidang filsafat menggunakan studi kepustakaan. Sumber dari buku, artikel, dan sumber relevan lainnya dikumpulkan. Setelah proses pengumpulan tersebut, penelitian berlanjut ke tahap identifikasi, komparasi, dan analisis terhadap temuan-temuan yang terungkap menggunakan metode hermeneutika. Menurut Schleiermacher sebagaimana dipaparkan oleh Siswanto, hermeneutika merupakan seni dan teori tentang pemahaman dan penafsiran akan simbol-simbol kebahasaan maupun non-kebahasaan (Siswanto, 2016). Penulis menginterpretasikan teks-teks terkait pemikiran Foucault dan homofobia, dengan fokus pada bagaimana kekuasaan mempengaruhi dan mengarahkan individu melalui wacana.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Kekuasaan

Pascaperang Dunia ke-II, kondisi intelektual Prancis didominasi oleh dua pemikiran besar, yakni Marxisme dan Fenomenologi. Perenungan mendalam atas kondisi sosial dan intelektual Prancis, menjadi latar belakang pemikiran Foucault terkait kekuasaan dan posisi pengetahuan. Kendati Foucault menolak dikategorikan sebagai filsuf strukturalisme, namun pemikirannya mengenai kekuasaan banyak dipengaruhi oleh aliran tersebut. Pengaruh strukturalisme menampakkan diri pada pandangannya mengenai relasi, bahwa makna sesuatu selalu hadir dan ditemukan dalam relasinya dengan yang lain. Jika kekuasaan menciptakan standar tertentu yang dianggap normal dan untuk bisa memahaminya, maka perlu dipahami adanya standar lain di luar definisi normal itu sendiri. Selain itu, dalam kerangka strukturalisme, individu merupakan entitas yang dibatasi oleh konteks sekaligus menyatu di dalamnya. Sistem politik, sistem sosial, dan sistem budaya adalah konteks yang merujuk pada identitas dan tindakan individu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam kerangka ini, individu bukanlah subjek yang menciptakan makna, melainkan sistem yang memproduksinya melalui individu (Afandi, 2012).

Normalisasi adalah inti pemikiran Foucault mengenai kekuasaan. Foucault menawarkan pandangan yang berbeda dari tradisi filsafat politik tradisional yang memandang kekuasaan dalam kerangka otoritatif, yakni adanya subjek dan objek kekuasaan, Foucault justru memandang bahwa kekuasaan menyebar dalam relasi dan berada di mana-mana (Afandi, 2012). Kekuasaan menurut Foucault, tidak hanya berpusat pada institusi-institusi formal atau individu yang memiliki otoritas formal, tetapi meresap ke dalam praktik-praktik sehari-hari, norma-norma, dan relasi kecil di masyarakat. Oleh karena kekuasaan meresap dalam setiap relasi di masyarakat, keberadaannya seringkali tidak disadari. Kekuasaan tidak datang dari luar, namun menyebar di dalam masyarakat dan menciptakan standar atau efek tertentu yang dianggap "normal" oleh masyarakat (Syafiuddin, 2018). Hal-hal yang tidak sesuai dengan standar normal tersebut dianggap sebagai yang lain (*deviant*). Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Penetapan standar dan normalisasinya berkaitan dengan produksi dan reproduksi pengetahuan. Kekuasaan, menurut Foucault, selalu termanifestasi melalui pengetahuan dan sebaliknya, bahwa pengetahuan selalu memiliki efek kuasa (Syafiuddin, 2018).

### b. Wacana

Wacana (*discourse*) dalam kerangka umum ilmu sosial diartikan sebagai sekumpulan ide, konsep, maupun keyakinan yang membentuk pengetahuan dan cara memahami dunia. Wacana merupakan hasil penyebaran dan normalisasi pengetahuan yang dilakukan oleh kekuasaan. Menurut teoretikus, pengetahuan dipahami sebagai kondisi yang dicapai manusia saat berhasil menemukan kebenaran objektif tentang dunia, yang berbeda dari pandangan Foucault dalam teori wacananya (Miller, 2023). Pertama, pengetahuan menurut Foucault bukanlah sesuatu yang bersifat internal pada agen (subjek individu). Sebaliknya, pengetahuan dipandang sebagai kumpulan klaim (*statements*) yang diberikan dari luar. Kedua, dalam teori Foucault, kumpulan pernyataan tersebut tidak memiliki nilai kebenaran yang objektif secara universal, melainkan dianggap sebagai perspektif yang bersifat definitif bagi suatu masyarakat, kelompok, atau institusi tertentu. Bentuknya bisa seperti norma sosial yang menjadi pedoman dan pandangan bersama akan suatu hal dianggap wajar atau tidak. Ketiga, pengetahuan yang merupakan kumpulan pernyataan yang telah menjadi norma kelompok, terkait erat dengan struktur dan dinamika kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, setiap kali kekuasaan dijalankan,

di sanalah pengetahuan terbentuk. Begitupun sebaliknya, setiap fragmen pengetahuan yang mapan merupakan alat pendukung kekuasaan.

### c. Seksualitas

Foucault, dalam *The History of Sexuality* (1976), Foucault tidak menyajikan sejarah tindakan seksual atau kenikmatan seksual, melainkan sebuah analisis mendalam tentang bagaimana seks berkaitan dengan produksi pengetahuan dan jalannya kekuasaan (Taylor, 2016). Istilah seksualitas (*sexuality*) sendiri sebenarnya adalah konstruksi sejarah yang diciptakan melalui strategi pengetahuan dan kekuasaan (Foucault, 1978). Oleh karena itu, seksualitas tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang secara alami ada dan dimiliki setiap individu yang kemudian didefinisikan oleh kekuasaan melalui pengetahuan. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan menciptakan berbagai macam seksualitas seperti heteroseksual, homoseksual, dan hermaphrodit. Pada volume pertama, Foucault mengkaji efek kekuasaan dalam menentukan identitas seksual sejak abad ke-17. Dialog konseptual pada periode ini, menurut Foucault (1978) lebih cenderung pada pandangan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang menindas (*sovereign power*). Hal ini membuat individu modern melihat seksualitas sebagai sesuatu yang menindas dan memaksa. Represi oleh kekuasaan dalam perbincangan mengenai seksualitas merujuk pada pandangan tradisional yang menyatakan bahwa kekuasaan menekan ekspresi seksualitas individu, terutama dalam masyarakat yang cenderung konservatif dengan basis nilai moral tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa meski hipotesis represi dimulai sejak abad ke-17, pembicaraan mengenai seksualitas masih relatif terbuka. Seiring waktu, keterbukaan dalam membicarakan seksualitas perlahan menghilang, terutama di era Victoria (awal abad ke-19), terjadi perubahan signifikan dengan munculnya batasan yang lebih ketat dalam membicarakan seksualitas (O'Callaghan, 2013). Di masa ini, diam menjadi norma yang harus diikuti. Hanya satu lokus seksualitas yang diakui dalam ruang sosial maupun di setiap rumah tangga, yaitu kamar tidur orang tua.

Menurut Foucault, represi memperkuat posisinya atas individu dan seksualitasnya melalui tiga cara (Foucault, 1978). Pertama, melalui bentuk larangan (*prohibition*). Tekanan atas seksualitas terwujud dalam norma sosial yang mengatur perilaku seksual yang boleh dan yang dilarang. Konsep "*procreative couple*" menegaskan bahwa hubungan seksual seharusnya hanya untuk tujuan reproduksi. Hal ini menyebabkan munculnya seksualitas alternatif, seperti homoseksualitas dan fetishisme yang dianggap sebagai perilaku abnormal. Kedua, melalui aturan diam (*rule of silence*). Pembicaraan mengenai seks dianggap sebagai hal yang eksklusif yang hanya dapat dilakukan oleh pasangan sah. Aturan ini memunculkan konsep 'tabu' dalam pembicaraan mengenai seksualitas. Ketiga, yakni ketiadaan (*non-existence*) yang menunjukkan adanya penolakan ketika membicarakan seksualitas alternatif yang dianggap abnormal (*deviant*). Seksualitas yang *deviant* hanya dapat dibicarakan dalam batas-batas tertentu, seperti di rumah bordil dan institusi mental seperti Rumah Sakit Jiwa.

Konsep homoseksualitas muncul pada abad ke-19 dan menjadi kategori baru dari praktik seksual, kesenangan (*pleasure*), dan hubungan interpersonal (Foucault, 2011). Di periode sebelumnya, seperti di abad ke-18, individu lebih berfokus pada konsep kebebasan (*libertinism*) daripada mengkategorikan praktik homoseksual ke dalam jenis perilaku seksual. Kedua konsep mengenai homoseksualitas tersebut dapat ditelusuri sebagai implikasi dari biopower. Pada abad ke-17, biopower berkembang dalam dua bentuk yang berbeda, yakni '*disciplinary*' yang terkait dengan disiplin tubuh dan '*regulatory*' yang diterapkan pada regulasi populasi (O'Callaghan, 2013). Ini menjelaskan kritik Foucault terhadap hipotesis represi yang muncul seiring dengan kapitalisme karena biopower dianggap sebagai unsur yang tak tergantikan dalam kapitalisme. Kapitalisme tidak mungkin terjadi tanpa upaya penyisipan tubuh-tubuh ke dalam mesin produksi dan penyesuaian fenomena populasi terhadap proses ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan individu ataupun rakyat, melainkan dengan populasi dan potensi manfaat yang bisa diambil. Kekuasaan yang cenderung mendukung heteroseksual karena berorientasi pada keuntungan kapital menciptakan regulasi yang sifatnya represif bagi individu ataupun kelompok yang memiliki seksualitas alternatif. Hal ini juga dilegitimasi dengan ilmu medis dan psikologi yang berkembang di periode tersebut yang melihat bahwa homoseksualitas sebagai abnormalitas atau sebuah kelainan, sehingga harus dipisahkan dari masyarakat untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

#### d. Konstruksi Homofobia

Agama menjadi akar utama homofobia dengan keterkaitannya pada dosa, karena homoseksualitas merupakan tindakan yang dilarang dalam Alkitab. Merujuk pada teologi Kristen di Barat, homoseksualitas dikutuk sebagai dosa, sehingga homofobia yang berkembang merupakan refleksi atas ketaatan iman Kristen (Britton, 1990). Sejak 1952, homoseksualitas telah dikategorikan sebagai penyakit mental (psikopatologi) menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) yang didasarkan pada paradigma medis yang berkembang pada abad ke-19. Klasifikasi ini telah membentuk pandangan negatif atas homoseksual yang turut memengaruhi konstruksi nilai dan norma di masyarakat atas apa yang dianggap normal dan yang tidak. Antihomoseksual yang secara luas mengekspresikan kebencian pada homoseksual berkaitan dengan ketakutan akan penularan, ketakutan akan melemahnya nilai-nilai, hingga ketakutan yang berakar pada agama. Barulah pada 1973, American Psychiatric Association (APA) menghapus homoseksualitas dari kategori tersebut dan menyatakan bahwa homoseksualitas (*same-sex orientation*) bukanlah kelainan atau abnormalitas (Herek, 2004).

Isitlah homofobia lebih dulu digunakan oleh aktivis gay yakni Jack Nichols dan Liger Clarke, untuk merujuk pada ketakutan orang-orang heteroseksual terhadap penilaian orang lain yang menganggap mereka homoseksual (Herek, 2004). Ketakutan ini, khususnya pada pria, menyebabkan mereka membatasi interaksi dengan pria lain yang berimplikasi pada penekanan terhadap nilai-nilai maskulinitas. Menurut Kimmel, maskulinitas bukanlah sebuah konsep yang tetap dan inheren, melainkan merupakan konstruksi sosial yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh nilai budaya dan social (Gergen & Davis, 2013). Konsepsi mengenai 'pria sejati' seringkali dikaitkan dengan ekspektasi tertentu yang diberikan kepada pria, yakni bahwa untuk dianggap sebagai 'pria sejati' mereka harus memenuhi standar tertentu, misalnya menjadi sosok yang kuat. Keberadaan standar tertentu, menyebabkan seorang pria terus dievaluasi oleh sesama pria berdasarkan kriteria tersebut dan saling bersaing untuk mencapai kualitas-kualitas yang diakui. Jika standar tersebut tidak dapat dipenuhi, seorang pria dapat merasa tidak berharga dan inferior. Gay seringkali diasosiasikan dengan feminitas yang merupakan oposisi dari maskulinitas. Adanya gambaran ideal mengenai sosok 'pria sejati', maka seorang pria akan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar maskulinitas; tidak hanya internal, namun juga eksternal seperti tidak ingin berdekatan dengan pria homoseksual. Homofobia, menurut Kimmel, merujuk pada ketakutan akan dianggap sebagai gay; sebagai seseorang yang bukan 'pria sejati' atau maskulin (Gergen & Davis, 2013). Apa yang seringkali dianggap sebagai maskulinitas sebenarnya dipahami sebagai semacam topeng agar citra yang ditampilkan tetap terjaga serta sebagai upaya untuk menekan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri seorang pria; demi pengakuan dari sesama pria. Dengan demikian, maskulinitas dapat dilihat sebagai bentuk defensif terhadap homofobia.

Pada 1972, George Weinberg menerbitkan "*Society and the Healthy Homosexual*" sebagai yang pertama kali mengenalkan istilah homofobia secara luas. Weinberg menjelaskan homofobia sebagai penyakit (*disease*), sikap (*attitude*), ketakutan untuk berada dekat dengan homoseksual (Wickberg, 2000). Tujuan dari penggunaan term 'fobia' untuk menjelaskan sikap dan pandangan antihomoseksual adalah sebagai oposisi dari pandangan umum yang bersumber dari paradigma yang berkembang di masa itu, yaitu homoseksual sebagai yang sakit, sedangkan masyarakat sebagai yang normal. Menurut Weinberg masyarakatlah yang dianggap sebagai yang sakit (fobia) sedangkan homoseksual dianggap sebagai yang sehat. Homoseksual dianggap sebagai suara sejati kebebasan dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh norma dan nilai-nilai. Lembaga psikiatri, menurut Thomas Szasz, sebenarnya bertanggung jawab atas produksi penyakit mental dan pengkategorianya, termasuk homoseksual yang pernah dikelompokkan sebagai penyakit mental (Wickberg, 2000). Pandangan ini sejalan dengan Michel Foucault dalam definisi dan konstruksi kegilaan (*madness*) dan kewarasan (*insanity*) sebagai alat kontrol.

#### e. Wacana Foucault dalam Memahami Homofobia sebagai Konstruksi Sosial

Pada awal abad ke-19, terdapat pandangan bahwa homoseksualitas merupakan orientasi seksual yang tidak normal dan merupakan penyakit mental atau patologis. Implikasi dari pandangan ini, yakni adanya praktik pengasingan, yang membuat banyak orang homoseksual diisolasi di Rumah Sakit Jiwa untuk mengembalikan 'kenormalan'. Foucault berpendapat bahwa keberadaan kategori normal dan tidak normal ini adalah hasil dari wacana yang dijalankan oleh kekuasaan untuk menyebarkan pengetahuan yang dianggap sebagai kebenaran (Afandi, 2012). Pada lingkup yang lebih luas, setiap masyarakat memiliki pemahaman tentang strategi

kekuasaan yang terkait dengan kebenaran. Beberapa wacana bisa diterima dan disebarluaskan sebagai kebenaran karena ada lembaga-lembaga yang menetapkan batasan antara yang benar dan tidak benar serta yang normal dan tidak normal. Rumah Sakit Jiwa adalah bentuk lembaga yang digunakan oleh kekuasaan untuk mengontrol masyarakat. Psikiater bahkan dianggap sebagai hakim penentu apa yang normal dan yang tidak normal. Pembicaraan mengenai wacana tidak pernah bisa dilepaskan dari kekuasaan, sebagaimana tesis Foucault yakni kekuasaan berada di mana-mana. Kekuasaan melalui wacana berupaya menyebarkan klaim-klaim yang 'dibenarkan' kepada masyarakat. Menurut Syafiudin (2018), pengetahuan adalah cara kekuasaan masuk ke dalam diri subjek tanpa disadari bahwa pengetahuan itu sendiri berasal dari subjek tertentu.

Konsep wacana menurut Foucault bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan yang terintegrasi dalam berbagai praktik sosial. Wacana sebagai mesin penghasil pengetahuan, berupaya menyebarkan klaim-klaim yang 'dibenarkan' kepada masyarakat. Jika pengetahuan diciptakan, kekuasaan dapat masuk ke dalam diri subjek tanpa diketahui bahwa pengetahuan berasal dari subjek tertentu, maka, melalui wacana, kekuasaan tidak hanya menciptakan pengetahuan tetapi juga membentuk realitas sosial. Penciptaan kategori seksualitas yang normal dan abnormal (*deviant*) merupakan bentuk pengetahuan yang dihasilkan oleh kekuasaan melalui wacana. Wacana seksualitas tidak hanya diproduksi pada teks dan bahasa, namun juga melalui aturan atau hukum dan praktik sosial sehari-hari. Foucault menyoroti penekanan pada norma sosial yang mengatur perilaku seksual yang boleh dan yang dilarang. Foucault melihat bagaimana represi yang dilakukan di abad ke-19 masih memengaruhi pandangan, nilai, dan norma di masyarakat modern, khususnya mengenai homoseksualitas. Pertama, agama diidentifikasi sebagai akar utama homofobia, menjadi alat kekuasaan yang memainkan peran sentral dalam mengatur dan mengontrol masyarakat. Agama digunakan sebagai alat untuk menetapkan norma-norma moral dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas. Pada konteks ini, homofobia tidak hanya sebagai sikap individu, tetapi sebagai hasil dari pengetahuan yang diberdayakan oleh institusi-institusi keagamaan. Kedua, medikalisasi homoseksualitas sebagai penyakit mental (psikopatologi) oleh DSM mencerminkan bagaimana ilmu kedokteran dan psikiatri digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol dan menormalkan perilaku seksual.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Homofobia merupakan respons yang diterima begitu saja oleh masyarakat terhadap homoseksualitas yang seringkali disertai dengan pamarjinalan dan tabu untuk membicarakannya. Homofobia secara historis berkembang dari berbagai latar belakang, termasuk agama, medis, dan pandangan yang memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan. Norma sosial dan moral yang ada tidaklah inheren; norma tersebut dibentuk melalui kekuasaan yang mengendalikan wacana-wacana. Wacana seksualitas, sebagai alat kekuasaan, menciptakan pemisahan antara seksualitas yang dianggap normal dan abnormal, seperti homoseksualitas. Hal ini meresap dalam praktik-praktik sosial, menghasilkan ketakutan dan fobia terhadap homoseksual yang termanifestasi dalam kekerasan, kebencian, dan diskriminasi. Perubahan pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas terjadi hanya pada tataran justifikasi tindakan, seperti pandangan agama dan medis, sementara stigma, stereotip, dan diskriminasi masih terus ditunjukkan pada kelompok homoseksual. Paradigma agama dan medis dianggap sebagai alat kekuasaan untuk menetapkan norma moral dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas. Di sisi lain, dalam perspektif Foucault, homoseksualitas merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, membebaskan diri dari batasan norma yang dibangun oleh kekuasaan. Penggunaan istilah "fobia" dalam homofobia juga dipertanyakan karena dapat dianggap sebagai izin tersirat untuk terus melakukan operasi pada kelompok homoseksual. Teori kekuasaan dan wacana Foucault memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana homofobia dapat dijelaskan sebagai konstruksi sosial. Wacana dianggap sebagai alat kekuasaan yang menciptakan dan menyebarkan pengetahuan, membentuk realitas sosial, dan mengatur pandangan masyarakat terhadap seksualitas. Homofobia, sebagai hasil dari kekuasaan yang termanifestasi dalam berbagai institusi, merupakan produk dari konstruksi sosial yang mencakup stigma dan stereotip palsu tentang homoseksualitas.

## 5. Daftar Pustaka

- Afandi, A. K. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.1.131-149>.
- Benjamin, R. A. (2021). *Peristiwa Mei 68 di Balik Film The French Dispatch*. <https://tirto.id/peristiwa-mei-68-di-balik-film-the-french-dispatch-gkMV>.
- Britton, D. M. (1990). Homophobia and Homosexuality: An Analysis of Boundary Maintenance. *The Sociological Quarterly*, 31(3), 423–439. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1990.tb00337.x>.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality: An Introduction, Volume 1* (Vol. 1). <https://muse.jhu.edu/pub/79/article/619129/summary>.
- Foucault, M. (2011). The Gay Science (N. Morar & D. W. Smith, Trans.). *Critical Inquiry*, 37(3), 385–403. <https://doi.org/10.1086/659351>.
- Gergen, M. M., & Davis, S. N. (2013). *Toward a New Psychology of Gender: A Reader*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9U0VAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1935&dq=toward+a+new+psychology+of+gender&ots=C1g-55iSQs&sig=SPo6mYPWWpdAGZzL92nal06mj1E&redir\\_esc=y#v=onepage&q=toward%20a%20new%20psychology%20of%20gender&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9U0VAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1935&dq=toward+a+new+psychology+of+gender&ots=C1g-55iSQs&sig=SPo6mYPWWpdAGZzL92nal06mj1E&redir_esc=y#v=onepage&q=toward%20a%20new%20psychology%20of%20gender&f=false).
- Herek, G. M. (2004). Beyond “Homophobia”: Thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century. *Sexuality Research and Social Policy*, 1(2), 6–24. <https://doi.org/10.1525/srsp.2004.1.2.6>.
- Logan, C. R. (1996). Homophobia?: No, Homoprejudice. *Journal of Homosexuality*, 31(3), 31–53. [https://doi.org/10.1300/J082v31n03\\_03](https://doi.org/10.1300/J082v31n03_03)
- Miller, S. (2023). *Foucault on Discourse and Power*.
- Mills, S. (2003). *Michel Foucault*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203380437>.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(1), 75–100. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>
- O’Callaghan, J. F. (2013). *The Sexual Experience: Michel Foucault and The History of Sexuality* [Murdoch University]. [https://researchportal.murdoch.edu.au/view/pdfCoverPage?instCode=61MUN\\_INST&filePid=13136906800007891&download=true](https://researchportal.murdoch.edu.au/view/pdfCoverPage?instCode=61MUN_INST&filePid=13136906800007891&download=true).
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.30742/Juispol.V1i1.1560>.
- Siswanto, J. (2016). *Horizon Hermeneutika*. Gadjah Mada University Press.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ref.v18i2.1863>.
- Taylor, C. (2016). *The Routledge Guidebook to Foucault’s The History of Sexuality*. Taylor & Francis.
- Wickberg, D. (2000). Homophobia: On the Cultural History of an Idea. *Critical Inquiry*, 27(1), 42–57. <https://doi.org/10.1086/448997>.